

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau

Siti Samsiah^a, Annie Mustika Putri^b, Winarni Winarni^c

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, siti.samsiah@umri.ac.id, Universitas Muhammadiyah Riau

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis, annemustika@umri.ac.id, Universitas Muhammadiyah Riau

^c Fakultas Ekonomi dan Bisnis, winarniany11@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Riau

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of applying government accounting standards, regional financial accounting systems, government internal control systems, information technology utilization, human resource competence, and good government governance on the quality of the Riau provincial government's financial reports. This study uses primary data. The population in this study were all employees of the financial section within the Riau provincial government, totaling 226 people in 33 OPD. Data analysis used in this study was multiple linear regression with the help of SPSS version 25 software and sampling was carried out using a saturated sample technique. The results of this study indicate that the application of government accounting standards, the regional financial accounting system, the government's internal control system, the use of information technology, human resource competence, and good government governance have a positive effect on the quality of the Riau provincial government's financial reports.

Keywords: *government accounting standards, regional financial accounting system, government's internal control system, the use of information technology, human resource competence, good government governance, quality of financial reports.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah 226 orang pada 33 OPD. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 25 dan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan *good government governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Kata Kunci: *standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan good government governance, kualitas laporan keuangan pemerintah.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan organisasi sektor publik di Indonesia dalam prakteknya diwarnai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik, baik di pusat maupun daerah. Sebagai entitas pelapor, pemerintah harus dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan (Bame, *et.al.*, 2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2021, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai. Walau sudah memperoleh opini WTP, namun dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diantaranya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas sebelas paket pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan pada Dinas PUPRPKP, dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau belum sepenuhnya memadai (<https://riau.bpk.go.id>). Kualitas laporan keuangan pemerintah berhubungan erat dengan standar akuntansi pemerintahan karena laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan pedoman dan aturan-aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku, oleh karena itu LKPD haruslah mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan. Salah satu masalah yang perlu diperhatikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penerapan SPIP yang lemah akan membuka peluang terjadinya *fraud* atas pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah menerbitkan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian inten pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Nurillah, 2014 dalam Maydiyanti, 2020).

2.2. Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam penerapan standar akuntansi pemerintah, dimana pemerintah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah jika informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sesuai dengan UU No. 71 tahun 2010. Karena SAP ini merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada teori agensi, dimana dalam teori agensi terdapat *bonding cost* yang merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Hal ini sejalan dengan *Agency theory* dimana standar akuntansi pemerintah merupakan mekanisme *bonding cost* karena membutuhkan adanya suatu patokan dalam pemerintah agar *agent* dapat bertugas sesuai dengan kepentingan *principal* (Afifah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Maydiyanti *et al.*, (2020) memberikan temuan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena suatu

pemerintah yang menerapkan standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk berjalannya sistem pemerintahan. Sehingga bisa disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

2.3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adanya sistem akuntansi keuangan daerah maka pemerintah diharapkan bisa menghasilkan laporan pertanggung jawaban yang memiliki sifat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Laporan keuangan yang valid dan andal bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal untuk mengambil keputusan. Hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada teori agensi, bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah apabila sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan secara baik dan benar, maka terwujudlah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabilitas dan transparansi. Sehingga siklus APBD dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lestari *et al.*, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maydiyanti *et al.*, (2020), memberikan temuan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga bisa disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

2.4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern yang berkualitas dan akurat untuk mengawasi, mengontrol, mengendalikan serta melindungi sumber daya organisasi agar tidak terjadi sesuatu penyelewengan pada organisasi maka akan terwujud keandalan laporan keuangan, objektivitas informasi, kepatuhan terhadap hukum, dan perundang-undangan serta memudahkan proses audit laporan keuangan. Penerapan pengendalian internal keuangan yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Lestari *et al.*, 2022).

Hubungan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori agensi, dimana dalam *agency theory* terdapat *monitoring cost* yang merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku *agent*. Hubungan *principal* dengan *agent* terjadi ketika pihak *principal* memberikan mandat kepada *agen* untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak *principal*. Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme *monitoring cost* karena dengan adanya pengendalian intern maka dapat dijadikan acuan oleh pihak *agent* agar tujuan *principal* dan *agent* dapat berjalan selaras (Afifah, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maydiyanti *et al.*, (2020) memberikan temuan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga bisa disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

2.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena teknologi informasi dipandang sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah dengan bantuan alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer dan perangkat lunak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan lebih tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Imelda *et al.*, 2017).

Hubungan penerapan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori agensi, menurut teori keagenan (*agency theory*) dalam hal pemanfaatan teknologi informasi pihak agen sebagai pengelola keuangan haruslah bisa dan paham menggunakan sistem komputer, sehingga mempermudah dalam pengelolaan data transaksi keuangan sehingga laporan yang dihasilkan dan disajikan dalam sistem informasi terstruktur dan lebih cepat dan akurat. Berdasarkan teori agensi, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana dengan bantuan alat teknologi yang canggih seperti perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan laporan keuangan, maka pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan

lebih tepat waktu untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Lestari *et al.*, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chodijah *et al.*, (2018), memberikan temuan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga bisa disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Penerapan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Riau.

2.6. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas dasar keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dalam pengelolaan bagian keuangan harus memiliki sumber daya manusia yang kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Jadi, apabila semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Putri *et al.*, 2016). Hubungan penerapan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), dimana kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini adalah berkaitan dengan pihak agen yang merupakan pihak pembuat laporan keuangan, haruslah memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan, seperti telah mengerti peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan, menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang semestinya, mendapatkan pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dan jika perlu sudah berpengalaman dalam bidang akuntansi sehingga dapat dengan mudah dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas (Safiyulloh, 2019).

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqba *et al.*, (2022), memberikan temuan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga bisa disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Penerapan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Riau.

2.7. Good Government Governance

Menurut Mardiasmo (2008) *Good government Governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Adanya *good government governance*, diharapkan pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk penyelenggaraan anggaran dan tujuan pemerintah. Hubungan penerapan *good government governance* dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori agensi, tentang sifat manusia yang bertindak oportunistik. Dengan adanya penerapan *good government governance* pada suatu organisasi akan mampu meminimalkan sifat oportunistik dari para manajemen sehingga berdampak pada perbaikan kinerja organisasi. Hubungan atau kontrak masih terjadi masalah agensi yang timbul karena adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oportunistik manajemen adalah dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance (GGG)* (Nanda *et al.*, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tullah *et al.*, (2019), memberikan temuan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena untuk menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang berkualitas selain mematuhi undang-undang yang berlaku suatu pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya juga harus menerapkan prinsip-prinsip *good government governance* sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga bisa disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Penerapan *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Riau.

2.8. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Good Governance Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau

Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik pemerintah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah juga diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah karena sistem akuntansi yaitu suatu kesatuan yang apabila ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) yang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai. Dengan berkembangnya teknologi informasi pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan menyederhanakan proses kerja pemerintahan. Selain itu diperlukannya kompetensi sumber daya manusia dapat mengetahui apakah suatu pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien. Dan dibutuhkannya *good government governance*, penerapan prinsip-prinsip *good government governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

H7: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan *Good Government Governance* secara bersama-sama berpengaruh positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Riau.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada responden secara langsung. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah 226 orang pada 33 OPD dan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 25.

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + e$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X_1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_5), dan *Good Government Governance* (X_6) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

4.1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, karena menggunakan enam variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan SPSS 25:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	,052	1,816	,028	,977
Standar Akuntansi Pemerintah	,206	,048	4,281	,000
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,202	,056	3,587	,000
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,203	,082	2,467	,015
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,225	,070	3,218	,002
Kompetensi SDM	,123	,056	2,201	,029
Good Government Governance	,133	,052	2,550	,012

Berdasarkan tabel 7 diperoleh hasil untuk variabel standar akuntansi pemerintah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,281 > 1,654$) dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa variabel standar akuntansi pemerintah (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau (Y). Maka dapat diambil kesimpulan hipotesis pertama diterima. Selanjutnya untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,587 > 1,654$) dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau (Y). Maka dapat diambil kesimpulan hipotesis kedua diterima. Selanjutnya untuk variabel

sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,467 > 1,654$) dengan tingkat signifikansi $0,015 < 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ketiga diterima. Kemudian variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_4) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,218 > 1,654$) dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat diterima. Selain itu, variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,201 > 1,654$) dengan tingkat signifikansi $0,029 < 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kelima diterima. Terakhir, variabel *good government governance* (X_6) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,550 > 1,654$) dengan tingkat signifikansi $0,012 < 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keenam diterima.

4.2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

F hitung	F table	Signifikansi	Alpha (α)	Keterangan
64,389	2,16	0,000	0,05	Diterima

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 64,389 lebih besar dari nilai F tabel 2,16, sedangkan nilai sig menunjukkan angka 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan *good government governance* secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini:

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,841	0,707	0,696	1,523

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,696 atau 69,6%. Artinya bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 69,6%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 30,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa variabel standar akuntansi pemerintah (X_1) memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} ($4,281 > 1,654$) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau dengan kata lain hipotesis (H_1) diterima.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berkaitan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa dimana standar akuntansi pemerintah merupakan mekanisme *bonding cost* karena membutuhkan adanya suatu patokan dalam pemerintah agar *agent* dapat bertugas sesuai dengan kepentingan *principal* (Afifah, 2019). Dengan diterapkannya SAP diharapkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau dapat terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta akurat untuk berjalannya sistem pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas dan akurat dapat dijadikan sebagai perbandingan kinerja pemerintah antar kurun waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maydiyanti *et al.*, (2020) memberikan temuan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena suatu pemerintah yang menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk berjalannya sistem pemerintahan.

4.4.2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,587 > 1,654$) dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau dengan kata lain hipotesis (H_2) diterima.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berkaitan dengan teori agensi bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah apabila sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan secara baik dan benar, maka terwujudlah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabilitas dan transparansi. Sehingga siklus APBD dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Lestari *et al.*, 2022). Penerapan SAKD dapat mempermudah dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta bebas dari salah saji material. Laporan keuangan yang valid dan andal dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maydiyanti *et al.*, (2020), memberikan temuan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena apabila Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan pada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah.

4.4.3. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,467 > 1,654$) dengan tingkat signifikan $0,015 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau dengan kata lain hipotesis (H_3) diterima.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berkaitan dengan teori agensi menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana dalam *agency theory* terdapat *monitoring cost* yang merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku *agent*. Hubungan *principal* dengan *agent* terjadi ketika pihak *principal* memberikan mandat kepada *agen* untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak *principal*. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan mekanisme *monitoring cost* karena dengan adanya pengendalian intern maka dapat dijadikan acuan oleh pihak *agent* agar tujuan *principal* dan *agent* dapat berjalan selaras (Afifah, 2019). Pengendalian intern pemerintah Provinsi Riau memiliki peran penting salah satunya yaitu untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Selain itu, pengendalian intern pemerintah bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang reliabel. Semakin baik penerapan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan maka akan semakin baik pula laporan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maydiyanti *et al.*, (2020) memberikan temuan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi.

4.4.4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,218 > 1,654$) dengan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_4) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau dengan kata lain hipotesis (H_4) diterima.

Pemanfaatan Teknologi Informasi berkaitan dengan teori agensi menyatakan bahwa dimana penerapan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

berdasarkan teori agensi, menurut teori keagenan (*agency theory*) dalam hal pemanfaatan teknologi informasi pihak agen sebagai pengelola keuangan haruslah bisa dan paham menggunakan sistem komputer, sehingga mempermudah dalam pengelolaan data transaksi keuangan sehingga laporan yang dihasilkan dan disajikan dalam sistem informasi terstruktur dan lebih cepat dan akurat. Berdasarkan teori agensi, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana dengan bantuan alat teknologi yang canggih seperti perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan laporan keuangan, maka pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan lebih tepat waktu untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Lestari *et al.*, 2022). Penggunaan komputer, *software* atau perangkat lunak lainnya yang sejenis secara optimal merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan menyederhanakan proses kerja pemerintah Provinsi Riau. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan juga akan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chodijah *et al.*, (2018), memberikan temuan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena suatu pelaporan keuangan pemerintah perlu memenuhi suatu karakteristik salah satunya memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, maka perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

4.4.5. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,201 > 1,654$) dengan tingkat signifikan $0,029 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (X_5) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau dengan kata lain hipotesis (H_5) diterima.

Kompetensi Sumber Daya Manusia berkaitan dengan teori agensi menyatakan bahwa penerapan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini adalah berkaitan dengan pihak agen yang merupakan pihak pembuat laporan keuangan, haruslah memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan, seperti telah mengerti peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan, menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang semestinya, mendapatkan pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dan jika perlu sudah berpengalaman dalam bidang akuntansi sehingga dapat dengan mudah dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas (Safiyulloh, 2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau telah memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami bidang akuntansi dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena laporan keuangan tersebut telah disusun dengan kemampuan yang memadai berdasarkan SAP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqba *et al.*, (2022), memberikan temuan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

4.4.6. Pengaruh Good Government Governnce Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa variabel *good government governnce* dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,550 > 1,654$) dengan tingkat signifikan $0,012 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *good government governnce* (X_6) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau dengan kata lain hipotesis (H_6) diterima.

Good Government Governnce berkaitan dengan teori agensi menyatakan bahwa penerapan *good government governnce* pada suatu organisasi akan mampu meminimalkan sifat oportunistik dari para manajemen sehingga berdampak pada perbaikan kinerja organisasi. Hubungan atau kontrak masih terjadi masalah agensi yang timbul karena adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oportunistik manajemen adalah dengan menerapkan prinsip *Good Government Governnce* (GGG) (Nanda *et al.*, 2021). Terciptanya *good government governanace* meningkatkan kesadaran pemerintah Provinsi Riau akan tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang dihasilkan sehingga penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan dilaksanakan

sesuai dengan SAP. Laporan keuangan yang berkualitas tersebut dapat diandalkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tullah *et al.*, (2019), memberikan temuan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena untuk menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang berkualitas selain mematuhi undang-undang yang berlaku suatu pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya juga harus menerapkan prinsip-prinsip *good government governance* sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

4.4.7. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan *Good Government Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($64,289 > 2,16$) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan *good government governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau dengan kata lain hipotesis (H_7) diterima.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik, terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai kebutuhan dalam lingkungan pemerintahan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta bebas dari salah saji material. Selain itu SPIP yang diterapkan dengan baik dan efektif, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi yang baik. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat membangun jaringan sistem informasi manajemen dan menyederhanakan proses kerja pemerintahan. Dalam hal ini komputer memiliki peran dalam membantu peningkatan kualitas informasi dikarenakan komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan dibandingkan dengan sistem manual. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia menunjukkan bahwasanya semakin tinggi kompetensi SDM yang dimiliki oleh SKPD tersebut maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena laporan keuangan telah disusun berdasarkan kemampuan yang memadai berdasarkan SAP. Selanjutnya, penerapan *good government governance* mendukung tata kelola pemerintah yang baik untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh hasil bahwa standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan *good government governance* secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik, terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai kebutuhan dalam lingkungan pemerintahan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta bebas dari salah saji material. Selain itu SPIP yang diterapkan dengan baik dan efektif, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi yang baik. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat membangun jaringan sistem informasi manajemen dan menyederhanakan proses kerja pemerintahan. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia menunjukkan bahwasanya semakin tinggi kompetensi SDM yang dimiliki oleh OPD tersebut maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena laporan keuangan telah disusun berdasarkan kemampuan yang memadai berdasarkan SAP. Selanjutnya, penerapan *good government governance* mendukung tata kelola pemerintah yang baik untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Provinsi Riau perlu menerapkan sistem akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta *good government governance* dengan lebih baik lagi sehingga Pemprov Riau dapat melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan. Sehingga Pemerintah Provinsi Riau dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bebas dari salah saji material dan diharapkan mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal variabel yang diteliti. Penelitian ini juga tidak melakukan konfirmasi mendalam atas jawaban responden yang diberikan pada kuesioner. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah serta melakukan wawancara mendalam untuk memperkuat argumen dan hasil temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, R. A. (2019). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi sumber daya manusia dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo). *Doctoral Dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Dr. Dewi Sarifah Tullah, M.Si., Ak., CA, Erma Apriyanti, M.Akun, N. W. (2018). *Pengaruh Penerapan Good Government Governance (Ggg) Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat dan Banten)*. 1–11.
- Imelda Latjandu, Lintje Kalangi, J. J. T. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Syria Studies*, 7(1), 1–12.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303.
- Maria Orpa Bame, Mona Permatasari Mokodompit, A. W. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Kampar). *Lensa Ekonomi*, 15(2), 100–109.
- Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69-78. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>
- Muhammad Iqba, Syifa Vidya Sofwan, R. M. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Muhammad. *Jurnal Ilmiah Akuntans*, 13(April), 1–15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Putri, A. M., Kirmizi, K., & Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ekonomi*, 24, 16–31.
- Safiyulloh. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar)*. 1, 11–55.
- Siti Chodijah Dan Nurul Hidayah. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Tekun*. Vol 8. No. 1. Maret 2018, 8(1), 34–48.
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah